

- e. Penyusunan mekanisme kebijakan partisipatif bagi pihak terkait maupun publik melalui organisasi bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- f. Dalam melaksanakan kebijakan memperkuat Kesiapsiagaan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif, agar mempedomani : UU.RI Nomor 24 Tahun 2007 terutama Pasal 50 sampai dengan pasal 56,PP Nomor 21 Tahun 2008 Bab III dan Perka BNPB Nomor 4 tahun 2008 terutama pasal 48

BAB V

KESIMPULAN DAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian, hasil dan pembahasan dapat disimpulkan efektifitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten Kerinci yang berpedoman pada kondisi dan temuan penanggulangan bencana tahun 2016-2017, bahwa :

- 5.1.1. Tingkat Pencapaian efektifitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten Kerinci secara keseluruhan dengan tingkat capaian rata-rata pada kategori “Cukup”, ditemukan tingkat capaian kategori ”Kurang” pada prioritas III indikator pembentukan dan fungsi jejaring serta tingkat capaian kategori “Baik” pada prioritas II Indikator Kajian risiko.
- 5.1.2. Penyebab belum efektifnya Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kabupaten Kerinci antara Lain :
 - a. Peralihan kewenangan pengelolaan aset dan sumberdaya, perubahan nomenklatur daerah menjadi 2 daerah otonom, kemantapan institusi BPBD dan personil yang sering dimutasi internal dan eksternal.
 - b. Perencanaan penanggulangan bencana belum disusun terpadu, terintegrasi partisipatif dengan memfungsikan unsur pengarah, jejaring relawan.
 - c. Masihnya belum maksimalnya potensi daerah mengidentifikasi dan memantau risiko, menerapkan sistem peringatan dini dan pemanfaatan pengetahuan, inovasi, diklat dan penelitian risiko bencana Belum terintegrasi : manajemen sumberdaya alam dan lingkungan, pengembangan sosial-ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pemukiman, pemulihan pasca bencana, tata guna lahan.

- d. Belum efektifnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana akibat dari: Kurangnya perangkat kebijakan penilaian dampak risiko bencana, belum disebarluaskan dampak risiko bencana dan prosedur pengurangan dampak.

5.1.3. Rekomendasi alternatif terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kerinci.

Dari temuan dan kendala pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana /dan Tingkat efektifitas. Agar terlaksana dengan efektif direkomendasikan :

- a. Melakukan kerjasama dalam penetapan aset dan penguatan kelembagaan BPBD dengan melengkapi personil sesuai kompetensi yang kebutuhan, menetapkan unsur pengarah, jejaring.
- b. Menyusun kebijakan penanggulangan bencana daerah secara terpadu dan terintegrasi dengan pembangunan lain dengan pola partisipatif
- c. Meningkatkan potensi daerah mengidentifikasi, mengkaji, memantau risiko dan penerapan sistem peringatan dini melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian.
- d. Melaksanakan upaya pengurangan penyebab risiko bencana yang mendasar dan melengkapi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
- e. Meningkatkan persiapan penilaian dampak risiko bencana, penyebarluaskan informasi data, dampak risiko bencana dan prosedur pengurangan dampak
- f. Agar pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana terlaksana sistematis dan efektif harus berpedoman pada peraturan perUU.RI-an yang relevan.

5.2. Saran-saran

Untuk mempercepat pencapaian tingkat efektifitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana disarankan beberapa hal berikut ini:

- a. Agar pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana terlaksana sistematis dan efektif maka dalam perencanaan dan pelaksanaan disarankan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Diharapkan agar Pemerintah daerah kabupaten Kerinci melakukan kaji ulang terhadap dokumen rencana penanggulangan bencana daerah dalam jangka

waktu paling lama setiap 2 tahun.

- c. Karena kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, disarankan kepada pihak terkait yang peduli terhadap masalah kebencanaan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut.
- d. Untuk mempercepat penyebaran informasi risiko kebencanaan diharapkan secepat mungkin mengintegrasikan pengetahuan tersebut kedalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Almi Putra, Darifus, (2017). Kumpulan Data kebencanaan Kabupaten Kerinci ` 2007-2012, BPBD Kabupaten Kerinci.
- _____. (2012). Analisis Pengaruh Bencana di Kabupaten Kerinci Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat: Bappeda Kabupaten Kerinci,
- Arikunto, (2010), Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek: Bineka Cipta, Jakarta
- Barley, P, (2006). Metode sampling (terjemahan) : Gramedia , Jakarta, .
- Chambel. JP, (2006). (Riset Dalam Efektifitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora : Erlangga, Jakarta ,
- Danhas. M, (2001). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat : Perpustakaan Universitas Andalas, 2011.
- Dunn, W, (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : UGM Press
- Duncan, (2005) Pengukuran Efektifitas organisasi, Pelita Press, Surabaya
- Ghozali, (2014), Instrumen Penelitian Kuantitatif : Firma Maju, Medan
- Gibson. J , (1985) Pendekatan Efektifitas Dari Tujuan dan Sistem : PN Balai Pustaka, Jakarta
- _____, (2017), . Hasil Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi, Jambi : Bappeda Propinsi Jambi
- Indrawijaya, (2008) Artikel Tinjauan Efektifitas Dari Sudut Pandang Pencapaian Tujuan : FISIPOL Unsri Press, Palembang,